

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TANJUNG BUKA DAN SALIMBATU SEBAGAI PENDUKUNG PUSAT KOTA TERPADU MANDIRI SALIMBATU

Arif Rohman¹, Sapriani², Liza Shahnaz³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia
arifrohman_ubt@yahoo.com¹, sapriani@yahoo.com², lizashahnaz@gmail.com³

ABSTRAK

Abstrak: Tujuan pelaksanaan pengabdian ini adalah untuk memaksimalkan potensi masyarakat dan lahan transmigrasi di Desa Tanjung Buka dan Desa Salimbatu. Metode pelaksanaan mencakup empat tahap, pertama adalah identifikasi, pendekatan sosial, persiapan, dan pelaksanaan kegiatan. Hasil pelaksanaan terlihat bahwa masyarakat antusias terhadap pelaksanaan kemitraan yang kami bangun, keberhasilan yang bermula dari identifikasi kebutuhan masyarakat seperti potensi masyarakat dalam membentuk suatu perkumpulan dan lahan kosong disekitar pemukiman yang tidak dimanfaatkan. Untuk Desa Salimbatu, beberapa masyarakat transmigrasi ditempat tersebut tidak sekedar bercocok tanam padi, namun juga berkebun harena hasilnya menjanjikan, sehingga kegiatan yang kami lakukan adalah pelatihan pembuatan pupuk organik. Kedua adalah pembentukan organisasi PKK sebagai wadah para ibu rumah tangga sebagai prospek katering untuk perusahaan sawit. Untuk Desa Tanjung Buka, hasil identifikasi dan pola masyarakat adalah ketersediaan lahan pekarangan di sekitar pemukiman yang tidak dimanfaatkan, jadi kegiatan yang kami laksanakan pertama adalah pemahaman masyarakat transmigrasi akan jamu sebagai pengganti obat kimia. Kedua pemanfaatan lahan kosong, dan ketiga bersama-sama membuat Apotik Hidup.

Kata Kunci: Pembangunan; Transmigrasi; Kawasan Perkotaan Mandiri; Food Estate

Abstract: *The purpose of implementing this service is to maximize the potential of the community and transmigration land in Tanjung Buka Village and Salimbatu Village. The implementation method includes four stages: identification, social approach, preparation, and implementation of activities. The implementation results show that the community is enthusiastic about implementing the partnership that we have built, the success of which stems from the identification of community needs such as the potential of the community in forming an association and vacant land around settlements that are unutilized. For Salimbatu Village, several transmigration communities in that place grow rice and garden because the results are promising. The activity we do is training in making organic fertilizers. The second is the formation of the PKK organization as a forum for housewives as a catering prospect for palm oil companies. For Tanjung Buka Village, the identification results and community patterns are the availability of unused yards around the settlements, so the first activity we carried out was the transmigration community's understanding of herbal medicine as a substitute for chemical drugs. The second is the use of vacant land, and the third jointly make the Living Pharmacy.*

Keywords: *Development; Transmigration; Independent Urban Areas; Food Estate*



Article History:

Received: 01-08-2021
Revised : 25-08-2021
Accepted: 28-08-2021
Online : 25-10-2021



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia tergolong pesat, yakni pada Tahun 2017 jumlah penduduk Indonesia mencapai 261 Juta Jiwa dengan laju pertumbuhan selama 7 (tujuh) tahun sebesar 1,34% (B. P. Statistik, 2018). Kita tau bahwa daerah yang padat penduduknya terjadi di Pulau Jawa, berkembang Sumatera dan Sulawesi, berbeda dengan Pulau Kalimantan dan Pulau Papua. Beberapa kebijakan yang dibangun oleh pemerintah untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk tersebut diantaranya program Keluarga Berencana (KB), pada tahun 1970 jumlah penduduk sekitar 4,6 menjadi 2,6 pada Tahun 1990 (Pahlupi, Suryana, & Setiawan, 2012). Selain program KB, program pemerintah yang diunggulkan dalam penanganan penduduk dan pemerataan kerja adalah transmigrasi.

Transmigrasi sebagai bagian dari program pembangunan nasional mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dan percepatan pembangunan di berbagai daerah. Otonomi daerah dan reformasi, mempunyai konsekuensi pada perubahan penyelenggaraan transmigrasi (Nitiyasa & Sudibia, 2013). Untuk membangun suatu komunitas masyarakat yang demikian memerlukan proses perencanaan yang melibatkan pihak terkait secara terintegrasi, menyeluruh dan terdiri atas tahapan yang jelas dengan memperhatikan aspek sosial budaya, ekonomi, hukum, administrasi dan aspek politik (Transmigrasi, 2015).

Sebagai konsekuensinya, penyelenggaraan transmigrasi diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, mendorong persebaran penduduk dan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan baru, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk semata, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari pusat, melainkan berdasarkan Kerjasama Antar Daerah yaitu antara daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Lebih dari itu, penduduk setempat semakin diberi kesempatan yang lebih besar untuk menjadi transmigran (TPS) dengan proporsi hingga 50%, bahkan dalam beberapa kasus terdapat permukiman transmigrasi dengan TPS lebih dari 50%.

Pelaksanaan Program transmigrasi dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan proyeksi, hal ini berdasar pada potensi kawasan yang ada di Lokasi penempatan. Tantangan transmigrasi saat ini tidak hanya pemerataan jumlah penduduk, namun juga menjadi bagian integral dari pembangunan daerah, dan penyelenggaraannya disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi spesifik daerah, dan mengharuskan implementasi transmigrasi lebih berwawasan kultural dan kearifan lokal. Peningkatan kerjasama yang harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam perencanaan kebijakan dan strategi pengembangan daerah

transmigrasi, serta dengan masyarakat (pemangku adat dan tokoh masyarakat) setempat terkait penyediaan dan status kepemilikan lahan (Yanuaris, 2019).

Program transmigrasi merupakan salah satu program yang digalakkan oleh pemerintah. Program ini juga berdampak signifikan terhadap perkembangan daerah baru, sehingga berbagai aspek harus menjadi pertimbangan para pemangku kebijakan dalam melaksanakan program ini (Rochim, 2018). Aspek terpenting dari pelaksanaan program transmigrasi adalah keterlibatan 2 (dua) daerah, yakni pengirim dan penerima karena tidak bisa hanya dibebankan pada 1 (satu) daerah saja, daerah pengirim atau daerah penerima saja (Prihatin, 2013).

Pelaksanaan program transmigrasi juga tidak mudah dan perlu bekal yang kuat terhadap calon pelaksana transmigrasi, hal ini dikarenakan kondisi alam yang berbeda dengan alam daerah asal (Alisadono S, 2006). Tidak jarang, beberapa transmigran enggan mengembangkan komoditi sesuai yang direncanakan sebelum pemberangkatan, hal ini tentunya harus disadari oleh pemerintah selaku fasilitator maupun masyarakat selaku pelaksana program transmigrasi (Puput Mutiara, n.d.).

Salah satu daerah tujuan transmigrasi di Indonesia adalah Pulau Kalimantan terutama Kalimantan Timur. Pelaksanaan transmigrasi di wilayah ini dinilai cukup berhasil karena terjadi pemekaran provinsi baru, yakni Provinsi Kalimantan Utara. Prospek *food estate* pertanian bidang padi merupakan salah satu pilot project yang digadang pemerintah di kawasan ini, akan tetapi ternyata masyarakat lebih prospek memanfaatkan lahan untuk perkebunan seperti buah-buahan (Nur, 2021). Melihat kondisi ini, maka perlu ditinjau mengenai kebijakan pola pembangunan transmigrasi di KTM Salimbatu dan dampaknya (Yuli, 2011).

Permasalahan lain adalah banyaknya warga transmigrasi lokal yang hanya memanfaatkan lahan dan tidak bermukim. Kemudian susah nya akses transportasi menuju perkotaan menyebabkan masyarakat transmigrasi tidak memanfaatkan potensi baik SDM maupun lahan pekarangan yang tersedia.

Melihat kondisi masyarakat transmigrasi yang berada di Desa Salimbatu dan Desa Tanjung Buka ini, maka tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian yang kami bangun adalah pertama untuk memaksimalkan peran ibu-ibu di daerah transmigrasi. Kedua peran warga dalam mengolah lahan pertanian melalui pembuatan pupuk organik, dan ketiga pemanfaatan lahan pekarangan di sekitar pemukiman warga dengan pembuatan Apotik Hidup.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dari kegiatan Program Kemitraan Masyarakat ini antara lain:

1. Identifikasi

Salah satu unsur penting yang dilakukan adalah indentifikasi berbagai permasalahan yang dialami oleh masyarakat transmigrasi di KTM Salimbatu. Karena titik patok KTM Salimbatu diharapkan dalam berkembang dan menjadi pusat perkotaan baru sehingga kebutuhan pemekaran dan pendukung lahirnya Provinsi Kalimantan Utara cepat terlaksana (Rizqil Mufid, 2019).

2. Pendekatan sosial

Perubahan sosial merupakan fenomena kehidupan yang dialami oleh setiap masyarakat di manapun dan kapan pun. Setiap masyarakat manusia selama hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupannya, yang terjadi di tengah-tengah pergaulan (interaksi) antara sesama individu warga masyarakat, demikian pula antara masyarakat dengan lingkungan hidupnya (Kasnawi & Prof. Dr. Sulaiman Asang, 2014).

Masalah pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kegiatan penting yang perlu dilakukan dalam upaya untuk memberdayakan terutama pada kelompok yang dinilai lemah dan rentang terhadap kemiskinan sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan serta dapat melepaskan diri mereka dari berbagai keterpurukan, ketertinggalan dan keter-belakangan dan dengan demikian keinginan mereka untuk menjadi suatu kelompok yang maju, mandiri dan terpenuhi segala kebutuhannya bisa tercapai. Hanya saja istilah pemberdayaan ini seringkali tumpang tindih dengan istilah pembangunan meski keduanya sesungguhnya memiliki kaitan erat satu sama lain namun bagaimana pun juga konsep pemberdayaan boleh dikata merupakan terjemahan dari kata "Empowerment" sedangkan kata pembangunan merupakan istilah yang diterjemahkan dari kata "Development" (Surabaya & Moral, 2014).

Salah satu aspek yang penting di bahas dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu masalah prinsip pemberdayaan yang terkait dengan persoalan kebijakan yang dapat di gunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberdayaan secara utuh, komprehensif dan menyeluruh sehingga sasaran yang ingin di capai terutama dalam memberdayakan kelompok yang di nilai sangat rentan terhadap masalah kemiskinan dapat terealisasi. Apalagi, dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks serta beragam bentuknya maka pemilihan kebijakan yang di anggap tepat, efektif dan akan menghasilkan sesuatu yang optimal dapat terwujud (Surabaya & Moral, 2014).

3. Persiapan

- a. Tahap ini dimulai dari persiapan pembekalan yang difasilitasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tahap ini merupakan salah satu langkah yang ditempuh, guna persamaan persepsi terkait dengan penempatan dan keberadaan masyarakat transmigrasi yang ada di KTM Salimbatu Kabupaten Bulungan.
- b. Penyusunan dan pengumpulan bahan seperti surat menyurat, bahan-bahan yang dibutuhkan selama pelaksanaan program Kemitraan Masyarakat.

4. Pelaksanaan kegiatan

- a. Penetapan kegiatan
Pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan sebagai wujud peran Universitas Borneo Tarakan sebagai kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam pengembangan kawasan KTM Salimbatu sebagai salah satu daerah yang diproyeksikan sebagai kawasan mandiri dan maju dalam mendukung foodestate di Kabupaten Bulungan.
- b. Penetapan waktu
Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program ini sekitar 5 (lima) Bulan.
- c. Penetapan tempat
Adapun KTM Salimbatu terdiri dari berbagai desa yang ada, dan juga beberapa Satuan Pemukiman yang diproyeksikan dalam kurun waktu yang tidak lama, dapat menjadi desa sendiri untuk mendukung pemekaran dan mendukung kelancaran Provinsi Kalimantan Utara.
- d. Penetapan orang yang terlibat
Adapun orang-orang yang terlibat dalam program ini tidak lain ada 3 (tiga) unsur, pertama Tim pelaksana kegiatan, Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata dan Masyarakat Transmigrasi termasuk didalamnya pemangku kebijakan pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Bulungan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salimbatu merupakan desa yang tertua dari desa terdekatnya salah satunya adalah desa Silva Rahayu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Desa Salimbatu merupakan desa yang memiliki segudang sejarah mengenai perjalanan desa Salimbatu dari dulu hingga saat ini. Asal muasal nama Salimbatu itu sendiri, konon dari kata orang tertua di desa tersebut, nama Salimbatu berasal dari kata Salam dan Batu, yang mana dulu ada salah satu wilayah yang merantau menyebarkan agama islam. Beliau dengan perahunya yang mirip tutung besar, berlayar meyusuri wilayah Kalimantan Utara, karena beliau lelah

maka beliau singgah kesalah satu desa (Salimbatu) untuk beristirahat. Sebagaimana umat islam, beliau memberikan salamnya "Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh", karena salam yang beliau berikan tidak satupun orang didesa tersebut menyahut sebab orang didesa itu belum menganut agama islam dan karena sahutan beliau berulang kali diutarakan maka dengan kuasa illahi, batu yang didekat beliau bergetar seakan-akan merespon salam dari waliallah tersebut, maka beliau memberikan nama buat desa tersebut menjadi Salimbatu dikarenakan fenomena dari sang illahi, sehingga beliau dengan tokoh masyarakat desa itu bersama-sama memutuskan untuk memberi nama desa itu dengan nama Salimbatu. Selain itu Salimbatu adalah bekas ibukota kerajaan Tidung yang berdiri 1690-1790 dan pada tahun 1790 pusat pemerintahan dipindahkan ke Tanjung Palas karena pada saat itu kerajaan Tidung dan kerajaan Bulungan bersatu menjadi kesultanan Bulungan (Rizqil Mufid, 2019).

Salimbatu juga memiliki beberapa Satuan Pemukiman (SP) diantaranya: SP 3, SP 5, SP 5A dan SP 6 (Rizqil Mufid, 2019). Salah satu satuan pemukiman yang terdekat dengan Salimbatu yaitu SP 5, yang merupakan lokasi transmigrasi dari pulau jawa yang terdiri dari 200 KK dan 200 KK penduduk lokal dengan mayoritas suku Tidung. SP 5 terbentuk karena adanya usulan masyarakat desa salimbatu dengan tujuan untuk memberdayakan lahan kosong dengan cara mengajukan proposal yang di ketahui oleh Kepala Desa dan Camat yang di sampaikan ke Dinas transmigrasi dan tenaga kerja (Mulyadi & Pribadi, 2015).

Kegiatan pengabdian bersama KKN yang kami lakukan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi

Beberapa permasalahan yang dapat kami identifikasi adalah, tidak tersedianya organisasi perempuan baik di kedua desa, masalah pupuk dan masalah obat-obatan, karena di daerah ini tidak tersedia puskesmas dan bahkan dokter jaga yang standby.

2. Pendekatan sosial

Pendekatan sosial yang kami lakukan adalah koordinasi dengan kepala desa dan dinas yang membidangi transmigrasi dan juga para ketua Rukun Tetangga dengan cara:

- a. Focus Group Discussion Bersama Tokoh Masyarakat Dengan Tema "*Membangun Kesadaran dan Peran Masyarakat Transmigrasi Terhadap Pengembangan Satuan Pemukiman (SP) 5*"
- b. Rembug Desa Untuk Sosialisasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dengan Tema "*Revitalisasi Kawasan Transmigrasi di Satuan Pemukiman (SP) 5*"

3. Persiapan

Langkah selanjutnya adalah persiapan, langkah ini adalah penyusunan program kegiatan dari hasil identifikasi dan pendekatan sosial. Persiapan yang dilakukan adalah mendesain spanduk, pembelian bahan dan alat untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pengabdian.

4. Pelaksanaan

Adapun beberapa kegiatan dalam mendukung *foodestate* di KTM salimbatu difokuskan pada 2 (dua) daerah penempatan transmigrasi, yakni Satuan Pemukiman (SP 5) dan Satuan Pemukiman Tanjung Buka (SP 8) adalah sebagai berikut:

1. Satuan Pemukiman (SP5)

- a. Sosialisasi edukasi PHBS (Tingkat SD) dengan tema “*Ayo Terapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat Sejak Usia Dini*” dan pembagian Vitamin C untuk seluruh siswa dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional.
- b. Pembinaan dan pelatihan kelompok tani SP 5 melalui sosialisasi pertanian dengan tema “*Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi Dalam Sektor Pertanian Di Kawasan Transmigrasi Satuan Pemukiman (SP) 5*” dan pembuatan organik cair mol dan kompos untuk meningkatkan kemandirian petani. Kegiatan ini berlangsung seperti pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik

- c. Pembentukan kader pemberdayaan masyarakat dan FGD bersama *stakeholder* terkait permasalahan di bidang pertanian dan promosi potensi pertanian yang ada di SP 5 dengan tema “*Mengaktifkan dan Meningkatkan Sinergitas Masyarakat dengan Stake Holder Dalam Rangka Optimalisasi Perekonomian*”. Kegiatan ini seperti pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat

d. Pembentukan dan Peresmian Taman Baca Masyarakat “Aksara” Untuk Meningkatkan Literasi Masyarakat SP 5 dan Pembuatan Denah SP 5.

2. Satuan Pemukiman Tanjung Buka (SP 8)

a. Administrasi Desa

Kegiatan ini berjalan dengan baik, bertujuan memperbaiki dan memperbaharui administrasi desa yang lama.

b. Sosialisasi Pengaktifan PKK

Kegiatan ini bertujuan memberikan ilmu perihal kegiatan yang menghasilkan untuk ibu-ibu PKK. Pentingnya pemberdayaan masyarakat berupa aktif dan berpartisipasi dalam wadah PKK adalah untuk menunjang berbagai macam aktifitas yang ada di Satuan Pemukiman, mengingat penempatan transmigrasi ini yang lokasinya terpencil, sehingga dibutuhkan sinergi antar masyarakat dalam membangun SP tersebut. Kegiatan ini berlangsung dengan baik seperti pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Kegiatan pengaktifan PKK

c. Forum Group Discussion Dinas Transmigrasi

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun komunikasi dan relasi antara Dinas Transmigrasi Kabupaten Bulungan dan seluruh warga Satuan Pemukiman Tanjung Buka (SP8).

d. CSR Tanaman Obat Keluarga

Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melestarikan kekayaan alam melalui tanaman yang ada di sekitar. Kegiatan ini berlangsung seperti pada Gambar 4 berikut.



Gambar 4. Pembuatan sarana pembatas taman obat dan Peresmian apotik hidup

D. SIMPULAN DAN SARAN

Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Satuan Pemukiman yang ada di Kota Terpadu Mandiri Salimbatu yakni Desa Salimbatu dan Desa Tanjung Buka, masyarakat terlihat antusias untuk mengikuti serangkaian kegiatan. Artinya bahwa masyarakat transmigrasi sadar akan potensi mereka tidak sekedar menanam padi, namun secara sosial kemasyarakatan mereka butuh pengembangan dalam wadah PPK. Mereka juga sadar bahwa kunjungan dokter di dua desa tersebut tidak setiap hari sehingga untuk ketahanan tubuh dan pemanfaatan lahan pekarangan, maka kami bersama-sama membangun Apotik Hidup. Sedangkan saran yang dapat kami sampaikan adalah, perlunya pembinaan dari dinas terkait secara konsisten dan berkelanjutan agar masyarakat transmigrasi dapat mengembangkan dirinya untuk kesejahteraan dan pembangunan wilayah transmigrasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, kami selaku pelaksana PKM mengucapkan terima kasih kepada Universitas Borneo Tarakan melalui LPPM dan Kementerian Desa dan PDPT yang telah supporting dana serta masyarakat transmigrasi yang ada di Kabupaten Bulungan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alisadono S. (2006). *Kebijakan transmigrasi melalui pendekatan sistem*. 1–33.
- Kasnawi, P. D. M. T., & Prof. Dr. Sulaiman Asang, M. S. (2014). Konsep dan Pendekatan Perubahan Sosial. In *Teori Perubahan Sosial: Vol. IPEM4439/M* (p. 1.3). Retrieved from <http://repository.ut.ac.id/4267/1/IPEM4439-M1.pdf>
- Mulyadi, B., & Pribadi, U. (2015). Analisis Persiapan Dalam Perencanaan Pemekaran Desa Di Kabupaten Bulungan (Studi Kasus di Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai). *Journal of Governance and Public Policy*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/jgpp.2015.0024>
- Nitiyasa, I. G., & Sudibia, I. K. (2013). Menggalakkan Program Transmigrasi Melalui Peningkatan Pembangunan Daerah. *Piramida*, IX(1), 50–56.

- Retrieved from
<http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=174323>
- Nur, A. (2021). Food Estate di Kalimantan Utara Tak Maksimal, Bulungan Siapkan 50 Ribu Hektar Kawasan Pangan.
- Pahlupi, R., Suryana, A., & Setiawan, A. (2012). Hubungan antara Kegiatan Penyuluhan Program Keluarga Berencana (KB) dengan Perubahan Sikap Penduduk Kabupaten Garut. *Ejournal Mahasiswa Universitas Padjajaran*, 1(1), 1–18.
- Prihatin, R. B. (2013). Revitalisasi Program Transmigrasi. *Jurnal Aspirasi*, 4(1), 57–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/aspirasi.v4i1.487>
- Puput Mutiara. (n.d.). Harmonisasi Kebijakan Transmigrasi Perkuat Capaian Pemberdayaan Kawasan.
- Rizqil Mufid, F. (2019). Sejarah Salimbatu, Desa yang Kini Berusia 288 Tahun.
- Rochim, A. I. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Ketransmigrasian di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Periode 2009-2014. *DIA: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.30996/dia.v15i1.1830>
- Statistik, B. P. (2018). *Statistical Yearbook of Indonesia 2018* (S. P. dan K. Statistik, Ed.). Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/download.html>
- Surabaya, U. N., & Moral, K. (2014). *Melalui Pemanfaatan Media “Baru.” XIII*(2), 50.
- Transmigrasi, D. J. P. K. dan P. P. (2015). *Transmigrasi Masa Doeloe, Kini dan Harapan Kedepan*. Jakarta.
- Yanuaris. (2019). Pemerintah Siapkan 6.600 Sertifikat Tanak Transmigrasi Kaltara.
- Yuli. (2011). Rencana Food Estate 30.000 Ha Bulungan.